



## **PEMBENTUKAN RELAWAN PENJAGA LAUT NUSANTARA BAKAMLA DALAM MENINGKATKAN STABILITAS KEAMANAN MARITIM**

**Tumount Fride, Angga Faris Saputra**

Progam Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Dalam menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla melibatkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan tugasnya dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut. Pelibatan masyarakat yang dilakukan Bakamla dengan membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala). Pembentukan Rapala difungsikan sebagai instrumen dalam melengkapi sistem peringatan dini Bakamla. Dalam melaksanakan strategi pembentukan Rapala, Bakamla mendayagunakan means, ends, dan ways untuk mengotimalkan strateginya. Pada proses mekanisme pembentukan Rapala, Bakamla membentuk prinsip, proses, instrumen hingga interaksi mekanisme pembentukan. Tujuan dari Penelitian ini ialah untuk menganalisa Strategi Bakamla dalam pelibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif explanatory. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya dan juga kajian pustaka lainnya. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Bakamla dalam pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara adalah dengan Perencanaan, rekrutmen serta pelatihan dan pendidikan. Untuk mekanisme pembentukan Rapala dalam melengkapi sistem peringatan dini berdasarkan pada prinsip, proses, instrumen hingga interaksi mekanisme pembentukan. Dalam proyeksi kedepan Rapala dapat dilibatkan sebagai salah satu komponen cadangan bermatra laut dengan memberikan kemampuan pertahanan.

**Kata Kunci:** Bakamla, Keamanan Maritim, Rapala.

## **PENDAHULUAN**

Badan Keamanan Laut dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan. Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Bakamla sendiri ada untuk menggantikan Bakorkamla yang memiliki dasar hukum peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla. Peraturan Presiden tentang Bakorkamla sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, walaupun dalam Undang-Undang tersebut tidak secara jelas menyebutkan Bakorkamla. Pergantian Bakorkamla menjadi Bakamla dilakukan karena Bakorkamla sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan seiring berjalannya waktu. Bakamla memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut; 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 3) Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; 4) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; 5) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 6) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam menyelenggarakan sistem peringatan dini, Bakamla melibatkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan tugasnya dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut.

Pelibatan masyarakat dalam hal ini ialah membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala). Pembentukan Rapala sebagai instrumen dalam melengkapi sistem peringatan dini Bakamla. Rapala hadir sebagai kelompok masyarakat yang turut serta dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bakamla ini berfokus pada masyarakat maritim.

Masyarakat maritim merupakan kelompok masyarakat yang diikat oleh kesatuan tempat tinggal, asal-usul, adat istiadat, dan bahasa, yang pada umumnya menggantungkan sepenuhnya atau sebagian terbesar kehidupan ekonominya pada pemanfaatan sumber daya laut (Endang, 2014). Adapun kelompok masyarakat yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat maritim antara lain adalah kelompok nelayan beserta kelompok lain yang terkait, serta kelompok orang-orang yang meskipun tidak berdomisili di wilayah pantai atau pesisir tetapi menggantungkan kehidupannya kepada aktivitas kemaritiman, seperti misalnya kelompok marinir, kelompok buruh bongkar muat kapal/perahu di pelabuhan, para pelaku ekspedisi muatan kapal laut, para pelaku wisata bahari, para pelaku industri dan jasa maritim (seperti industri perkapalan yang meliputi industri galangan kapal, penunjang galangan kapal, bangunan lepas pantai), dan sebagainya. Secara umum semua kelompok masyarakat, baik yang merupakan pelaku langsung berbagai aktivitas kemaritiman maupun para pelaku pendukung dan pemerhati bidang kemaritiman dapat dikategorikan sebagai masyarakat maritim. Maka upaya yang dilakukan Bakamla ialah membentuk Rapala sebagai komponen gugus tugas pembantu dalam

mewujudkan stabilitas keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Pelibatan masyarakat maritim ini berasaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar sekaligus poros maritim dunia dengan sepuluh perbatasan maritim nusantara. Letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh dua samudera besar, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya yang besar dari wilayah perairan. Luas perairan, laut teritorial dan perairan pedalaman, lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI (Anwar, 2016). Dengan tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi, maka total luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi (Anwar, 2016). Melihat potensi yang dimiliki, bangsa Indonesia sangat berpeluang untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pelibatan masyarakat maritim juga sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha Bela Negara, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan. Jika lebih dikhususkan pada pertahanan dan keamanan laut maka masyarakat maritim yang paling sesuai untuk menjadi komponen pendukung bagi instansi penegak hukum laut. Karena sudah tentu masyarakat maritim lebih

mengenal laut daripada masyarakat yang hidup di darat. Cina sebagai negara kontinental sudah lebih dahulu melibatkan masyarakatnya dalam hal ini peran para nelayan untuk membantu instansi penegak hukum lautnya. Cina membentuk Milisi Maritim yang beranggotakan nelayan yang sudah terlatih dan terorganisasi secara rapi. Mereka juga disebut sebagai *hybrid civilian-naval force* karena secara tidak langsung ikut terintegrasi sebagai penegak hukum yang tidak resmi dan komponen pembantu angkatan laut (J.Kraska, 2015). Negara lain seperti Jepang juga sudah berencana melibatkan nelayannya untuk ikut berpatroli bersama penjaga pantai demi menjaga sumberdaya ikannya yang sering diambil secara ilegal oleh nelayan Korea Utara. (Nasution, 2018).

Adapun tujuan dibentuknya rapala ialah upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut. Dengan sistem kesukarelaan sebagai penjaga laut nusantara tentunya hal ini akan menjadi masalah baru jika tidak di antisipasi oleh Bakamla. adapun hal yang didapat ketika masyarakat maritim bergabung menjadi relawan penjaga laut nusantara maka Bakamla akan memberikan; 1) Pelatihan dan pembinaan keterampilan dalam upaya keselamatan dan perlindungan lingkungan laut, 2) Mendapatkan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, 3) Mendapatkan kartu identitas dan atribut Rapala, serta 4) Relawan sendiri bisa mendapat penghargaan dari Bakamla dan dari Gubernur atau Bupati/Walikota. Sehingga harapannya mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi relawan.

Dari uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana Strategi dalam

pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara melengkapi Bakamla guna meningkatkan stabilitas keamanan maritim? Untuk membantu peneliti dalam menjabarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus kajian pada penelitian ini;

Bagaimana strategi Bakamla membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara guna meningkatkan keamanan maritim?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif *explanatory*. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam dan dianalisis dari berbagai sudut pandang secara deskriptif. Dalam penyampaian informasi dilakukan secara *explanatory* yakni menjelaskan secara rinci mengenai berbagai hal terkait Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara dan ditambahkan dengan data yang diperoleh melalui data yang diperoleh dan dipadukan dengan opini Peneliti.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Menurut Moleong (2002: 103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut

Taylor, (dalam moleong), data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang relevan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bakamla merupakan salah satu instansi keamanan maritim yang dimiliki Indonesia dengan tugas melakukan Patroli Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Bakamla maka berbagai upaya dan strategi dilakukan untuk meningkatkan keamanana martim di Indonesia. Salah satu yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah strategi Bakamla dalam memberdayakan masyarakat sebagai Relawan penjaga laut nusantara. Adapun strategi yang dilakukan Bakamla ialah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk membentuk Rapala dengan memberikan pelatihan dan pendidikan secara berkala. Potensi yang dimiliki Bakamla, seperti personel yang kompetitif dalam melaksanakan tugas keselamatan dan keamanan di wilayah laut nantinya dapat bertanggungjawab dalam membekali relawan. Adanya Rapala tentu akan menambah kekuatan dukungan yang berbasis kepada masyarakat.

Pelibatan masyarakat maritim sendiri sebagai Rapala tentu akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi

Bakamla, karena hal ini disadari bahwa tidak selalu aparat ada di lingkungan laut. Sehingga dengan adanya pelibatan masyarakat ini tentu akan menjadi sebuah keputusan tepat guna dalam meningkatkan dan mengklarifikasi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Disisi lain juga Rapala menjadi sarana bagi Bakamla meningkatkan stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bakamla bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertarik dan peduli terhadap wawasan kemaritiman. Dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan pendekatan dan edukasi yang baik kepada masyarakat. Perlu adanya edukasi berkaitan dengan Relawan penjaga laut nusantara ini, adapun cara yang dilakukan oleh Bakamla ialah dengan melibatkan masyarakat dalam garda terdepan dalam sistem penyampaian informasi Bakamla. hal ini dilakukan agar masyarakat sendiri memiliki perhatian dan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan di lingkungan laut sekitar tempat tinggal mereka.

Strategi seperti yang disebutkan oleh (Paster) memiliki tiga unsur yaitu *ends*, *means*, dan *ways*. Ketiga unsur tersebut harus terkandung dalam menjalankan suatu strategi, termasuk dalam memberdayakan masyarakat maritim sebagai Relawan Penjaga Laut yang di bentuk oleh Bakamla.

Tujuan (*ends*) dari pembentukan Rapala oleh Bakamla adalah sebagai upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut. Kegiatan yang dilakukan oleh Bakamla ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kemaritiman dan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan laut mereka tinggal. Agar kelak jika ada tindak kejahatan di laut maka

masyarakat melalui Rapala mampu memobilisasi dan memberikan respon yang tepat. Pembentukan Rapala juga merupakan tindak lanjut dari pembinaan desa maritim yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Bakamla. Selain itu pembentukan Rapala ini juga bertujuan untuk mensinergikan kelompok atau desa binaan dari beberapa instansi lainnya.

Sarana (*Means*) yang digunakan dalam pembentukan Rapala sebagai kelengkapan sistem peringatan dini Bakamla, seperti ketersediaan kantor perwakilan Bakamla di daerah sebagai sarana penyampaian informasi, dan pelatihan bagi Rapala. Adanya kantor perwakilan Bakamla di daerah juga dapat menjadi tempat berkumpul para relawan sebagai salah satu komunikasi sosial yang di bangun. Selain itu sarana yang dimiliki Bakamla dalam mendukung pelibatan Rapala dalam sistem peringatan dini ialah adanya sistem pelaporan yang berbasis digital. Selain itu Bakamla juga memiliki aplikasi keamanan maritim yang tersedia di *google play store* aplikasi ini berguna bagi relawan dan masyarakat sekitar dalam meminta bantuan ketika terjadi tindak kecelakaan atau kejahatan di lingkungan laut. Aplikasi ini tentunya akan berguna bagi nelayan dan para pelaut karena Rapala akan membantu Bakamla merespon lebih cepat tindakan apa yang segera diambil.

*Cara (Ways)* untuk melibatkan Rapala sebagai alat kelengkapan sistem peringatan dini Bakamla yang berbasis manusia. Bakamla memberikan pelatihan dan pendidikan berupa kemampuan dasar keamanan dan keselamatan di laut. Agar ketika terjadi sesuatu di laut Rapala ini mampu memberikan pertolongan pertama sebelum datangnya aparat ke lapangan. Selanjutnya Rapala diberikan kemampuan mengoperasikan aplikasi keamanan maritim berbasis android yang menjadi *tools* dalam membantu kegiatan Rapala setiap harinya. Aplikasi

berbasis androin sendiri tentunya memudahkan Rapala dalam mengetahui peristiwa apa yang terjadi di laut. Rapala juga diberikan pemahaman mengenai sistem pelaporan terintegrasi milik Bakmla melalui digital (Sigondola).

Komunikasi sosial dibangun dalam melaksanakan strategi pembentukan Rapala. Hal ini berguna dalam memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan Bakamla ialah melakukan penyuluhan tentang kesadaran untuk memiliki wawasan kemaritiman. Tujuan komunikasi sosial adalah menyamakan persepsi tentang pemberdayaan masyarakat melalui komunitas Rapala yang berkaitan dengan Ruang, Alat dan kondisi juang serta memelihara dan meningkatkan sinergi Bakamla dengan masyarakat maritim dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Strategi yang dilakukan Bakamla dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada Rapala agar masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi dalam melengkapi sistem peringatan dini Bakamla. Strategi ini telah Bakamla lakukan sehingga pada tahun 2020 ini Rapala yang sudah terbentuk ada di 4 daerah yaitu, Lampung, Sambas, Banyuwangi dan Natuna Utara. Empat daerah ini dipilih dan merupakan usulan dari masyarakat setempat yang telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kantor perwakilan Bakamla untuk diberikan pelatihan dan pendidikan dasar keamanan dan keselamatan di laut. Prioritas keempat daerah ini juga merupakan wilayah yang rawan akan potensi ancaman kemaritiman. Sehingga kehadiran Rapala tentu akan membantu Bakamla dalam meningkatkan stabilitas keamanan maritim Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa perbandingan model konseptual ditemukan rentang antara *real world* dan *system thinking* dimana aktivitasnya belum dilakukan (ditemukan gap penelitian) oleh instrumen terkait. Berikut pembahasan masing-masing *gap* penelitian dianalisa dengan menggunakan teori, penelitian terdahulu dan hasil wawancara penelitian.

*Pertama,* dalam memberdayakan masyarakat lebih lanjut hendaknya Bakamla melakukan identifikasi terhadap kearifan lokal yang ada pada masyarakat. hal ini mengingat indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang menjadi peninggalan nenek moyang. Identifikasi ini juga akan berpengaruh pada kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan Bakamla. Proses identifikasi ini juga akan membantu Bakamla dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. proses identifikasi juga akan sangat efektif dalam menentukan program yang bersesuaian dengan kondisi masyarakat maritim yang ada. Klasifikasi keunikan yang dimiliki masyarakat ini mampu menjadi modal kekuatan bagi Rapala dalam membantu Bakamla menjaga Laut Nusantara.

*Kedua,* kearifan lokal masyarakat tentu akan mampu menambah khasanah dalam wawasan kemaritiman Indonesia. Kearifan lokal sendiri mampu dikelola oleh Bakamla dan Rapala sebagai salah satu instrumen yang mampu menjadi kekuatan bagi sistem peringatan dini Bakamla. sebagai contoh, ialah kearifan lokal masyarakat Aceh yang memiliki "*Smong*" sebagai alat pendeteksi keselamatan dari adanya bahaya laut seperti Tsunami, Di Jogjakarta memiliki cerita mitologi "*Nyi roro kidul*" mitologi ini memiliki penafsiran secara harfiah bahwa sebenarnya laut selatan berbahaya karena memiliki ombak yang besar ( LIPI Press, 2020). Dengan mengetahui

kearifan lokal yang dimiliki masyarakat seperti tersebut diatas tentunya Bakamla akan mengetahui bagaimana pendekatan yang tepat kepada masyarakat sekitar. Selain itu kearifan lokal ini mampu dijadikan sebagai program yang unik dalam pengatan Rapala yang berbasis wawasan maritim. Rapala juga nantinya menjadi agen-agen edukasi yang rasional dan mampu merekonstruksi kearifan lokal masyarakat menjadi lebih edukatif sehingga menjadi instrumen kekuatan bagi Rapala sendiri dan Bakamla.

*Ketiga*, Kedepannya Rapala tak hanya difungsikan sebagai alat kelengkapan sistem peringatan dini Bakamla. lebih baik lagi jika Rapala ini dibekali dengan kemampuan pertahanan sebagai upaya untuk dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara. Rapala bisa dibentuk seperti milisi Cina yang ada di laut Natuna Utara sebagai alat kelengkapan pertahanan negara berbasis masyarakat. tentunya dalam menjadikan Rapala menjadi komponen cadangan harus membangun sinergi dan kerjasama dengan TNI AL dalam pelaksanaannya. Hal ini juga bisa menjadi sinergi kedua lembaga dalam membentuk komponen cadangan matra laut atau komponen cadangan berbasis masyarakat atau berbasis nelayan. Seperti yang disebutkan dalam wawancara dengan Spotmar Mabasal:

*“dalam rangka implementasi UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN, sejalan dengan hal tersebut TNI AL melalui Spotmar juga memiliki tugas menyiapkan pelatihan komponen cadangan matra laut yang bersumber dari sumber daya nasional beserta data pendukungnya sehingga kedepannya akan lebih baik untuk disinergikan agar lebih optimal.”*

Komponen cadangan dengan matra laut atau berbasis masyarakat/nelayan ini tentu sangat dibutuhkan bagi Indonesia mengingat luas wilayah Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau oleh Bakamla

dan TNI AL. Dengan adanya komponen cadangan ini tentu akan lebih membantu dalam upaya pertahanan negara sehingga stabilitas keamanan maritim di Indonesia dapat terwujud.

*Keempat*, setiap kegiatan hendaknya dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk analisa selama kegiatan berlangsung. Selain itu monitoring dan evaluasi juga berguna dalam kegiatan selanjutnya mengenai bagaimana seharusnya program itu berjalan dan bagaimana respon terhadap kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pembentukan Rapala ini belum dilakukan evaluasi karena mengingat kondisi pandemi yang mengakibatkan terkendala ruang dan waktu. Sehingga proses monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara *by phone*. Karena jika mengacu pada jadwal monitoring dan evaluasi Rapala harusnya dilakukan setiap 3 bulan. Namun untuk mengantisipasi kendala yang ada komunikasi melalui aplikasi pesan sangat membantu dalam memantau perkembangan Rapala. Walaupun kegiatan ini belum terhitung belum efektif. Namun setidaknya Bakamla memiliki gambaran kasar hasil monitoring dan evaluasi yang nantinya digunakan dalam melanjutkan kegiatan pada waktu berikutnya.

## SIMPULAN

Strategi Bakamla dalam pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara adalah dengan Perencanaan, rekrutmen serta pelatihan pendidikan. Adapun *means, ends, dan ways* strateginya ialah: *Means* dalam pembentukan Rapala ini ialah keterlibatan sumber daya manusia Bakamla dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada Rapala. Dalam pembekalan pendidikan dan pelatihan Rapala didukung dengan infrastruktur berupa ketersediaan gedung/kantor perwakilan di daerah bahkan hingga sarana aplikasi digital yang dimiliki Bakamla. *Ends*, dari pembentukan Rapala

ini ialah efektifitas Rapala dalam melengkapi sistem Peringatan dini Bakamla. Dengan kehadiran Rapala kegiatan tindak penyelamatan keamanan dan keselamatan di laut bisa dilakukan respon yang lebih cepat. Sedangkan ways yang Bakamla gunakan ialah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berkenaan dengan kemampuan dasar keamanan dan keselamatan di lingkungan laut.

dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 3.Paster, A. J. (n.d.).

Sulistiyono, S. T. (2016). *Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah*. *Lembaran Sejarah*, 104.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, S. (2016). *Developing Formidable Indonesia Maritime Security in The Analysis of Interest, Threat, and Sea Power*. *Jurnal Pertahanan*, 70.

Burge, S. (2015). *An Overview of the Soft Systems Methodology*. *System Thinking: An Approaches and Methodologies*.

Endang, S. (2014). *Etnis Maritim dan Permasalahannya*. *Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*.

J.Kraska, d. M. (2015). *The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia*. *Stockton Center for the Study of International Law*.

Keliat, M. (2009). *Keamanan Maritim dan Impilkasi Kebijakannya bagi Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 113.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press

LIPI Press. (2020). *The Untold Story Java Southern Sea*.

Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Mehregan, R. e. (2012). *An application of Soft System Methodolog*.

Nasution, A. M. (2018). *Peran Nelaya dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol.8*.

Nazili Abdul Azis, L. T. (2016). *Kewenangan Badan keamanan Laut (BAKAMLA)*